

## PENGARUH KINERJA KEUANGAN, DANA ALOKASI UMUM DAN SILPA PADA ALOKASI BELANJA MODAL

Ade Imron Rosadi<sup>1</sup>  
I D. G. Dharma Suputra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: [adeimron\\_vikerz@yahoo.com](mailto:adeimron_vikerz@yahoo.com)/ tlp: 085739621755

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh kinerja keuangan, dana alokasi umum, dan SiLPA pada pengalokasian anggaran belanja modal pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali pada periode 2010-2014. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 45 Laporan Realisasi Anggaran kabupaten/kota yang mencakup 8 Kabupaten dan 1 Kota dengan periode penelitian 2010-2014. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa seluruh variable independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian daerah berpengaruh signifikan dan negatif pada alokasi belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali, dana alokasi umum berpengaruh signifikan dan positif pada alokasi belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali, dan SiLPA signifikan dan positif pada alokasi belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali.

**Kata kunci:** Kinerja Keuangan, Dana Alokasi Umum, SiLPA, Belanja Modal

### ABSTRACT

*The purpose of this study to examine the effect of financial performance, general allocation fund, and SiLPA of the budget over the allocation of the capital expenditure budget in district/cities in the province of Bali in 2010-2014. The sampling method used was saturated sampling technique. The sample in this study the Budget Realization Report number 45 districts/cities that covering 8 districts and 1 city in the study period 2010-2014. Data analysis method used is multiple linear regression analysis method. Based on the analysis found that across the independent variables affect the dependent variable. Financial performance in the form of the ratio of local independence significant and negative effect on capital expenditure for the district/city of Bali Province, the general allocation fund significant and positive effect on capital expenditure for the district/city of Bali province, and SiLPA significant and positive impact on the capital expenditure for the district/city of Bali Province.*

**Keywords:** *Financial Performance, General Allocation Fund, SiLPA, Capital Expenditure*

## **PENDAHULUAN**

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh bagi tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dikenal dengan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, meminimalisasi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kuantitas pelayanan publik (Andirfa, 2009). Perkembangan pelaksanaan otonomi atau desentralisasi memberikan kesempatan bagi kabupaten untuk memperluas potensi (Irawan, 2011).

Penerapan otonomi daerah baik di provinsi, kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat mengalokasikan sumber daya ke belanja daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Kusnandar & Siswanto (2012) menyatakan pelaksanaan otonomi daerah menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas

kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah. Lin & Liu (2000) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat memberikan perubahan yang berarti untuk pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Memasuki era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor salah satunya adalah sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik akan dapat menambah daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah (Harianto & Adi, 2007). Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Maharani, 2010 dalam Kusnandar dan Siswanto, 2012). Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah daerah.

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif

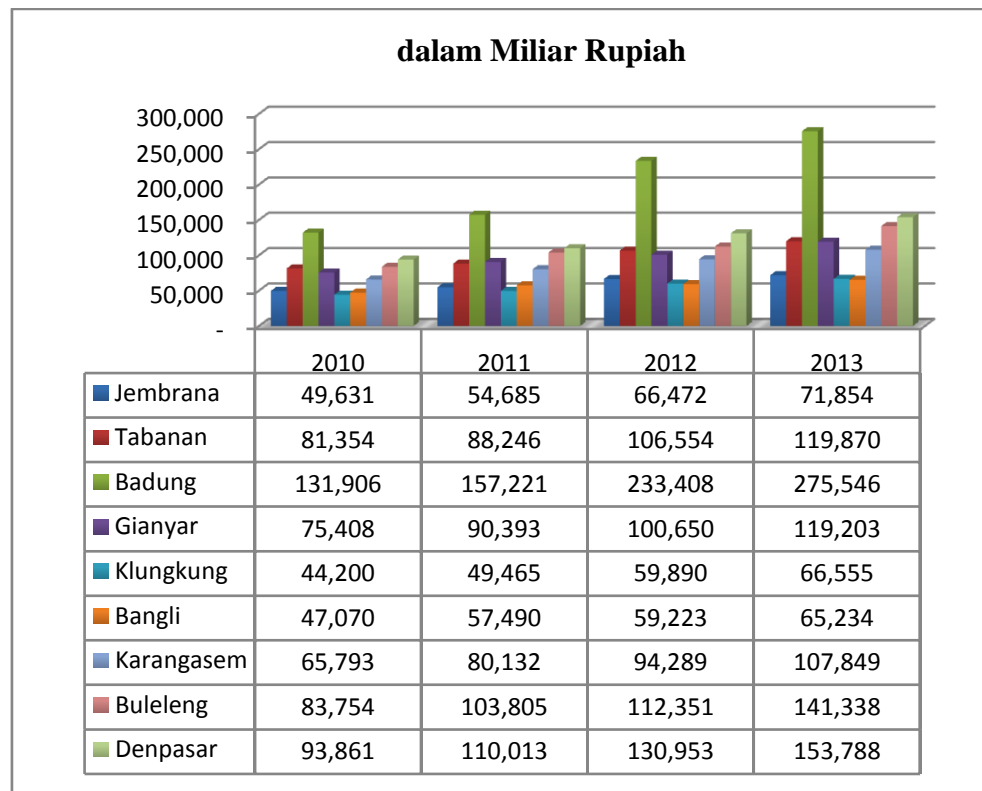
dalam memecahkan masalah di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003). Permasalahan seputar alokasi belanja tersebut menjadi lebih parah bila kewenangan pemerintah daerah secara mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

Pada upaya peningkatan kemandirian daerah, pemerintah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah. Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan (Nugroho, 2012).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Alokasi belanja modal ini ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Selama ini belanja daerah lebih banyak dialokasikan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas

pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyirat pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. Kecenderungan belanja daerah se-Provinsi Bali untuk periode tahun 2010 - 2013 disajikan pada Gambar 1 sebagai berikut:



**Gambar 1.**  
**Grafik Kecenderungan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Periode 2010-2013**

*Sumber:* BPS Provinsi Bali, 2010-2013

Grafik diatas menunjukkan bahwa kecenderungan belanja pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bali periode tahun 2010 s.d. 2013, secara umum

mengalami peningkatan, diantaranya Belanja Pemerintah Kabupaten Badung, Gianyar, Karangasem, Buleleng dan Pemerintah Kota Denpasar. Untuk Pemerintah Kabupaten Badung, belanja daerah pada Tahun 2010 sebesar Rp 131,9 Miliar Rupiah, Tahun 2011 sebesar Rp 157,2 Miliar Rupiah, Tahun 2012 mengalami peningkatan sehingga menjadi Rp 233,4 Miliar Rupiah, pada Tahun 2013 jumlah ini terus meningkat sehingga mencapai Rp 275,5 Miliar Rupiah. Rata-rata peningkatan belanja daerah kabupaten Badung mencapai 28,6 persen. Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar pada Tahun 2010 adalah sebesar Rp 75,4 Miliar Rupiah, pada Tahun 2011 sebesar Rp 90,3 Miliar Rupiah, pada Tahun 2012 nilai total belanja daerah meningkat menjadi Rp 100,6 Miliar Rupiah, dan pada Tahun 2013 terus mengalami peningkatan, sehingga menjadi Rp 119,2 Miliar Rupiah. Rata-rata peningkatan belanja daerah kabupaten Gianyar mencapai 16,5 persen. Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Tahun 2010 sebesar Rp 65,7 Miliar Rupiah, Tahun 2011 sebesar Rp 80,1 Miliar Rupiah, pada Tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 94,2 Miliar Rupiah, dan pada tahun 2013 terus mengalami peningkatan, sehingga mencapai Rp 107,8 Miliar Rupiah. Rata-rata peningkatan belanja daerah kabupaten Karangasem mencapai 18,0 persen. Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2010 sebesar Rp 83,7 Miliar Rupiah, Tahun 2011 sebesar Rp 103,8 Miliar Rupiah, pada Tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 112,3 Miliar Rupiah dan pada tahun 2013 terus mengalami peningkatan, sehingga mencapai Rp 141,3 Miliar Rupiah. Rata-rata

peningkatan belanja daerah kabupaten Buleleng mencapai 19,3 persen. Sedangkan Belanja Daerah Pemerintah Kota Denpasar pada Tahun 2010 sebesar Rp 93,8 Miliar Rupiah, Tahun 2011 sebesar Rp 110,0 Miliar Rupiah, pada Tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 130,9 Miliar Rupiah dan pada tahun 2013 terus mengalami peningkatan, sehingga mencapai Rp 153,7 Miliar Rupiah. Rata-rata peningkatan belanja daerah Kota Denpasar mencapai 17,9 persen.

Keuangan daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah merupakan alokasi sumber daya daerah dan media yang digunakan untuk mengevaluasi prestasi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah untuk kepentingan publik dan dipertanggungjawabkan sehingga mendorong pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat (Askam, 2008), dengan demikian perlu dilakukan analisis kinerja keuangan dengan membandingkan kinerja yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, dengan cara menganalisis rasio-rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan daerah (Bratakusumah, 2001).

Halim (2008), hasil analisis kinerja keuangan dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Semakin baik Kinerja keuangan daerah akan meningkatkan pendapatan daerah. Penelitian Sularso (2011), menyatakan bahwa besar kecilnya Alokasi Belanja Modal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh Kinerja Keuangan Daerah.

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang berlanjut. Menurut halim (2007) analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, *debt service coverage ratio*, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio efektivitas PAD, rasio tingkat pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan rasio kontribusi BUMD. Namun penelitian ini hanya menggunakan satu indikator yang mewakili dari beberapa indikator yang lainnya yaitu: rasio kemandirian dengan pertimbangan (1) Tingkat kemandirian dan ketergantungan bersifat *trade off*, jadi cukup memakai salah satu saja dalam penggunaannya. (2) Untuk indikator yang berkaitan dengan pinjaman daerah, misalnya *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), tidak digunakan dalam penelitian ini karena kabupaten dan kota di Provinsi Bali lebih banyak yang tidak memiliki pinjaman daerah atau mereduksi pinjaman daerahnya dari tahun ketahun.

Rasio Kemandirian Daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan besarnya PAD terhadap jumlah total pendapatan daerah. Sehingga memunculkan permasalahan suatu daerah yang dikatakan mandiri dapat meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan publik. Hal ini senada dengan penelitian Vegasari (2011) bahwa Rasio Kemandirian Daerah tahun lalu berpengaruh



signifikan terhadap belanja modal tahun berikutnya. Selanjutnya, terdapat permasalahan yang muncul dari implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut. Yakni, adanya ketimpangan dan kesenjangan sumber daya dan potensi yang dimiliki antara daerah satu dengan daerah yang lain yang nantinya akan memberikan dampak kecemburuan sosial.

Demi mengurangi kesenjangan dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan, lahirilah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Dana Perimbangan menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. (Kusnandar dan Siswantoro, 2012)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pendanaan dalam pelaksanaan desentralisasi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Berdasarkan sumber pendanaan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi lebih lancar dengan tidak mengabaikan distribusi

pendapatan antar wilayah yang timpang seperti yang terjadi pada masa lalu. (Carson, 2002 : 47-48 dalam Badrudin, 2012 : 6-7)

Berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda (Pemerintah Daerah), Pempus (Pemerintah Pusat) akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemda. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat.

Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar-pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh daerah (Simanjuntak dalam Sidik et al, 2002 dalam Prakosa, 2004). Adanya transfer dana ini bagi Pemda merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri. Namun, kenyataannya, transfer dari Pempus merupakan sumber dana utama Pemda untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah, yang oleh Pemda dilaporkan di perhitungan APBD. (Prakosa, 2004)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmi (2014) di Bali, Ardhani (2011) di Jawa Tengah, Solikin (2009) di Jawa Barat, dan Tuasikal (2008) di Kabupaten/Kota di Indonesia memperoleh hasil dimana terdapatnya pengaruh positif DAU terhadap belanja modal. Akan tetapi penelitian yang dilakukan

oleh Kusnandar & Siswantoro (2012) memperoleh hasil bahwa tidak terdapatnya pengaruh DAU terhadap belanja modal. Kondisi demikian disebabkan DAU yang diterima oleh daerah hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal.

Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. SiLPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah diteliti oleh Ardhini (2011) dengan lokasi penelitian di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sejalan dengan Ardhini, penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Siswantoro (2012) menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan yang positif serta signifikan SiLPA terhadap belanja modal. Kondisi demikian memberikan informasi bahwa SiLPA adalah salah satu sumber pendanaan belanja modal. Liliana et al. (2011) menyatakan hubungan antara pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah adalah penting, mengingat relevansinya bagi kebijakan terutama berkenaan dengan defisit anggaran.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis,

efisiensi, dan efektif atau memenuhi partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah. Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk dapat meningkatkan investasi daerah adalah tingginya rasio belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal dalam pemerintah daerah dipengaruhi oleh baik tidaknya kinerja keuangan daerah. (Sularso & Restianto, 2011). Berdasarkan uraian diatas dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, hipotesisi dapat dirumuskan:

H<sub>1</sub>: Kinerja Keuangan berupa Rasio kemandirian keuangan berpengaruh pada Alokasi Belanja Modal

Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki

sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai kegiatannya dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik. (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al. (dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*. Landasan teoritis di atas menghasikan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh pada Alokasi Belanja Modal

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) diindikasikan menjadi salah satu sumber pendanaan belanja modal untuk pelayanan publik. Belum ada penelitian mengenai pengaruh SiLPA terhadap belanja modal karena dalam pelaksanaannya terkadang belum ada maksimalisasi pemanfaatannya. SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban

lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Penelitian yang dilakukan Ardhini (2011) menguatkan hal tersebut dimana SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Namun menurut Kumorotomo (2010), besarnya SiLPA menunjukkan masih lambatnya perbaikan kemampuan aparat daerah dalam penganggaran. Landasan teoritis di atas menghasikan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh pada Alokasi Belanja Modal

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Pengertian metode asosiatif menurut Sugiyono (2009:55) adalah penelitian yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Kausal. Tujuan peneliti ingin mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan, Dana Alokasi umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Alokasi Belanja Modal. Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Menurut Sugiyono (2009:38) pengertian objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian ini adalah Kinerja Keuangan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Belanja Modal yang terdapat pada

Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun anggaran 2010-2014.

Menurut Sugiyono (2009:59) variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*variable dependent*). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ini dapat diukur dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah Dana Alokasi Umum ditambah jumlah pinjaman. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah dalam bentuk *block grant* yang pemanfaatan diserahkan sepenuhnya kepada daerah, atau dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor. 33 Tahun 2004). Variabel ini diukur melalui besarnya target DAU yang diperoleh daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran. DAU ini diukur dengan melihat nilai DAU yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58

tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada Pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Variabel ini diukur dari jumlah SiLPA yang ada di Laporan Realisasi APBD per Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.

Menurut Sugiyono (2009:59), variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Belanja Modal. Belanja modal Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal ini diukur dengan melihat nilai belanja modal yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain. Pemilihan data untuk kelima tahun realisasi anggaran tersebut dengan pertimbangan bahwa saat tersebut merupakan tahun-tahun awal pelaksanaan Kepmendagri 13/2006.



Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:115). Didalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Jadi jumlah objek penelitian sebanyak 40, yaitu terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota dalam rentang waktu lima tahun, yaitu tahun 2010 s.d. 2014. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009:116). sampel yang digunakan adalah seluruh anggota populasi yaitu kabupaten/kota se-Provinsi Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota periode 2010-2014. Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode sensus dengan mengambil semua populasi dijadikan objek penelitian yaitu sebanyak 8 Kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali Periode penelitian dari tahun 2010 – 2014.

Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengambilan data penelitian yang memuat informasi mengenai suatu subjek, objek atau kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat dan disusun dalam arsip (Indiantoro dan Bambang, 002:146). Data yang dianalisis bersumber dari dokumen Data Neraca Daerah, realisasi PAD, Total Penerimaan Daerah, DAU, dan Belanja Modal dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010–2014 yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)). Selain itu

diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. .

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda linier yang digunakan untuk melihat pengaruh variable bebas terhadap variable terikat. Data diolah dengan bantuan software SPSS seri 17.00. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen (sekarana, 1992).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- |                      |  |                |                     |
|----------------------|--|----------------|---------------------|
| Y                    | : Alokasi Belanja Modal                  | X <sub>1</sub> | : Kinerja Keuangan  |
| α                    | : Konstanta                              | X <sub>2</sub> | : Dana Alokasi Umum |
| β <sub>(1,2,3)</sub> | : Koefisien Regresi X <sub>(1,2,3)</sub> | X <sub>3</sub> | : SiLPA             |
| e                    | : Error                                  |                |                     |

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dilihat dari jumlah semesta sampel (N), nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel dalam penelitian. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai label kategori tanpa nilai intrinsik, oleh sebab itu tidak tepat dilakukan penghitungan nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari variabel tersebut (Ghozali, 2012;4).

**Tabel 1.**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Keuangan	45	4,70	713.26	360,973	153,93860
DAU	45	132.000.000,00	855.000.000,00	466.460.000,00	150.679.000,00
SiLPA	45	24.780.383,97	899.000.000,00	160.690.000,00	212.522.000,00
Belanja Modal	45	42.555.098,00	949.000.000,00	166.780.000,00	177.829.000,00
Valid N (listwise)	45				

*Sumber:* data sekunder diolah, (2016)

Variabel kinerja keuangan berupa Rasio kemandirian daerah memiliki nilai terendah sebesar 4,70 dan nilai tertinggi 713.26 dengan nilai rata-rata 360,973. Standar Deviasi untuk kinerja keuangan sebesar 153,93860 artinya terjadi penyimpangan nilai kinerja keuangan berupa rasio kemandirian daerah yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 153,93860.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai terendah sebesar 132.000.000,00 dan nilai tertinggi 855.000.000,00 dengan nilai rata-rata 466.460.000,00. Standar Deviasi untuk Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 150.679.000,00 artinya terjadi penyimpangan nilai Dana Alokasi Umum (DAU) yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 150.679.000,00.

Variabel SiLPA memiliki nilai terendah sebesar 24.780.383,97 dan nilai tertinggi 899.000.000,00 dengan nilai rata-rata 160.690.000,00. Standar Deviasi untuk SiLPA sebesar 212.522.000,00 artinya terjadi penyimpangan nilai SiLPA yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 212.522.000,00. Variabel Belanja Modal memiliki nilai terendah sebesar 42.555.098,00 dan nilai tertinggi 949.000.000,00 dengan nilai rata-rata 166.780.000,00. Standar Deviasi untuk Belanja Modal sebesar

177.829.000,00 artinya terjadi penyimpangan nilai Belanja Modal yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 177.829.000,00.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum (DAU) ( $X_2$ ) dan SiLPA ( $X_3$ ) pada Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali ( $Y$ ). Analisis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-79823993.879	33675839.568		-2.371	.023
Kinerja Keuangan	-1352519.642	463240.893	-.248	-2.920	.006
Dana Alokasi Umum	.292	.064	.248	4.576	.000
SiLPA	.990	.074	1.184	13.422	.000

*Sumber:* data sekunder diolah, (2016)

$$Y = -79823993.879 - 1352519.642X_1 + 0,292X_2 + 0,990X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar -79823993,879 menunjukkan bahwa nilai kinerja keuangan ( $X_1$ ), dana alokasi umum ( $X_2$ ) dan SiLPA ( $X_3$ ) konstan, maka pengalokasian belanja modal akan menurun sebesar 79.823.993,879 persen. Nilai koefisien regresi kinerja keuangan ( $b_1$ ) sebesar -1352519,642 menunjukkan apabila kinerja keuangan naik sebesar satu persen, akan mengakibatkan penurunan pada pengalokasian belanja modal ( $Y$ ) sebesar 1.352.519,642 persen dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol. Nilai koefisien regresi DAU ( $b_2$ ) sebesar 0,292 menunjukkan apabila dana alokasi umum meningkat sebesar satu persen, akan

mengakibatkan peningkatan pada pengalokasian belanja modal (Y) sebesar 0,292 persen dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol. Nilai koefisien regresi SiLPA ( $b_3$ ) sebesar 0,990 menunjukkan apabila SiLPA meningkat sebesar satu persen, akan mengakibatkan peningkatan pada pengalokasian belanja modal (Y) sebesar 0,990 persen dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.

Uji kelayakan model (F) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan. Hasil analisis kelayakan model (F) ini dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji F**

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.244E18	3	4.148E17	115.618	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1.471E17	41	3.587E15		
	Total	1.391E18	44			

Sumber: data sekunder diolah, (2016)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai F hitung sebesar 115,618 dengan signifikan F sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$ , maka model regresi linear berganda layak digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Untuk melakukan pengujian secara simultan dapat dilihat pada tabel di atas bahwa nilai tingkat signifikansi uji F dua sisi sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan, dana alokasi umum (DAU) dan SiLPA berpengaruh signifikan positif secara simultan pada alokasi belanja modal, sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan hasil nilai signifikansi dengan  $\alpha = 0,05$  dan dapat dijelaskan dengan melakukan pengujian hipotesis pertama dapat melihat kembali tabel 2 dan didapat bahwa nilai tingkat signifikansi uji t dua sisi untuk variabel kinerja keuangan sebesar 0,006 yang dimana dalam hal ini menunjukkan bahwa 0,006 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial kinerja keuangan berupa kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan dengan koefisien bernilai negatif pada alokasi belanja modal, sehingga hipotesis pertama ( $H_{a1}$ ) dalam penelitian ini diterima. Jadi, terdapat pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah pada alokasi Belanja Modal.

Melakukan pengujian hipotesis kedua dapat melihat kembali tabel 2 dan didapat bahwa nilai tingkat signifikansi uji t dua sisi untuk variabel dana alokasi umum (DAU) sebesar 0,000 yang dimana dalam hal ini menunjukkan bahwa 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial dana alokasi umum berpengaruh signifikan dan positif pada alokasi belanja modal, sehingga hipotesis kedua ( $H_{a2}$ ) dalam penelitian ini diterima. Jadi, terdapat pengaruh dana alokasi umum pada alokasi Belanja Modal.

Melakukan pengujian hipotesis ketiga dapat melihat kembali tabel 2 dan didapat bahwa nilai tingkat signifikansi uji t dua sisi untuk variabel SiLPA sebesar 0,000 yang dimana dalam hal ini menunjukkan bahwa 0,000 lebih kecil daripada

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial SiLPA berpengaruh signifikan dan positif pada alokasi belanja modal, sehingga hipotesis ketiga ( $H_{a3}$ ) dalam penelitian ini diterima. Jadi, terdapat pengaruh sisa lebih pembiayaan pada alokasi Belanja Modal.

Hasil analisis pengaruh kinerja keuangan pada alokasi belanja modal yang ditunjukkan pada tabel 2 di peroleh nilai signifikansi uji t sebesar 0.006 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  dan nilai koefisien regresi Kinerja Keuangan sebesar -1352519,642. Nilai t negatif menunjukkan bahwa Kemandirian Daerah mempunyai hubungan yang tidak searah dengan Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan berupa kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan dan negatif pada alokasi belanja modal. Hasil analisis tersebut konsisten dengan hasil penelitian Vegasari (2011) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Hasil ini menerima hipotesis  $H_{a1}$  yang menyatakan kinerja keuangan berpengaruh pada alokasi belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya koefisien negatif yang berarti jika tingkat kemandirian daerah naik sebesar satu persen, maka alokasi belanja modal akan turun sebesar 1.352.519,642 persen. Berdasarkan Tabel 2, walaupun pemerintah daerah mandiri dalam hal keuangan dengan tidak bergantung kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah telah mandiri, tetapi presentase pengalokasian belanja modal menurun hal ini dapat disebabkan PAD pemerintah

daerah dialokasikan untuk belanja lain yang bukan termasuk belanja modal. Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan variabel yang digunakan dalam beberapa penelitian pengalokasian belanja modal. Dari beberapa hasil penelitian tentang pengalokasian belanja modal menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh dengan arah negatif terhadap pengalokasian belanja modal, Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan nilai yang signifikan dengan arah negatif. Jadi semakin mandiri suatu daerah maka presentase pengalokasian belanja modal akan menurun. Dengan demikian hipotesis kinerja keuangan berupa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh pada pengalokasian belanja modal diterima.

Hasil analisis pengaruh DAU pada alokasi belanja modal yang ditunjukkan pada tabel 2 diperoleh nilai signifikansi uji t sebesar 0.000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  dan nilai koefisien regresi DAU sebesar 0,292. Hal ini menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal. Hasil ini menerima hipotesis  $H_{a2}$  yang menyatakan DAU berpengaruh pada alokasi belanja modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka akan semakin tinggi pula belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Semakin tinggi DAU yang diterima, semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya terutama untuk meningkatkan pelayanan publik. Penelitian Holtz-Eakin et al, (1985) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat



keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja Pemerintah Daerah. Meskipun otonomi daerah telah diberlakukan sejak lama, namun kenyataannya masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang masih menggantungkan sumber pendanaan pemerintah daerahnya pada dana perimbangan (dana transfer dari Pemerintah Pusat). Besar nilai DAU dipastikan akan menambah jumlah belanja modal Pemerintah Daerah. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian Sugiardi dan Supadmi (2014) di Bali, Ardhani (2011) di Jawa Tengah, Solikin (2009) di Jawa Barat dan Tuasikal (2008) di Kabupaten/Kota di Indonesia yang mengatakan variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal.

Hasil analisis pengaruh SiLPA pada alokasi belanja modal yang di tunjukan pada tabel 2 di peroleh nilai signifikansi uji t sebesar 0.000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  dan nilai koefisien regresi SiLPA sebesar 0,990. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal. Hasil ini menerima hipotesis  $H_{a3}$  yang menyatakan SiLPA berpengaruh pada alokasi belanja modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi SiLPA yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka akan semakin tinggi pula belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Siswantoro (2012), serta Ardhani (2011) menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif,

dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008). Namun menurut Kumorotomo (2010), besarnya SiLPA menunjukkan masih lambatnya perbaikan kemampuan aparat daerah dalam penganggaran.

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Pada penelitian ini, koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai dari *adjusted R<sup>2</sup>* karena nilai *adjusted R<sup>2</sup>* dapat naik ataupun turun apabila satu variabel ditambahkan ke dalam model. Hasil *adjusted R<sup>2</sup>* dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4.**  
**Hasil R<sup>2</sup> dan Adjusted R<sup>2</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.964 <sup>a</sup>	.894	.887	5.98956E7

Sumber: data sekunder diolah, (2016)

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa besarnya *adjusted R<sup>2</sup>* adalah 0,887. Hal ini menunjukkan bahwa 88,7% variasi alokasi belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel kinerja keuangan, Dana alokasi umum dan SiLPA sedangkan sisanya sebesar 11,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja Keuangan berupa kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan dan negatif pada Alokasi

Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010-2014. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan dan positif pada Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010-2014. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan dan positif pada Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010-2014.

Berdasarkan simpulan yang telah dilakukan maka dapat diberikan beberapa saran yaitu Pemerintah Daerah diharapkan agar lebih mengembangkan potensi dan sektor-sektor ekonomi daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih mandiri secara finansial dalam mendanai seluruh aktivitas pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan seefektif mungkin untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang akan meningkatkan produktivitas publik. Supaya memprioritaskan alokasi DAU dan belanja modal pada bidang-bidang yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik, seperti infrastruktur atau fasilitas-fasilitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemda Provinsi agar membuat regulasi atau Peraturan Gubernur terkait dengan penganggaran belanja modal yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan dan melakukan serah terima aset tetap dari kabupaten/kota yang sudah dibangun di daerah tersebut. Pemda kabupaten/kota agar membuat kebijakan atau skala prioritas pembangunan fisik yang dianggarkan untuk belanja modal daerah

sehingga sinkron dengan kebijakan penggunaan Dana PAD dan Dana Perimbangan di seluruh kabupaten/ kota Provinsi Bali.

## REFERENSI

- Andirfa, Mulia. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. *Bali Dalam Angka 2010-2014*.
- Balitbang Provinsi NTT. 2008. Analisis tentang tingkat efiseinsi dan efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Litbang NTT*, IV-03.
- Brata, Kusumah,D.2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Darwanto & Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X 26-28 Juli.*, Makassar.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Laporan Evaluasi Belanja Modal*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Holtz-Eakin, Whitnet Newey, & Harvey Rosen. 1985. *Implementing Causality test with panel data, with an example from local public finance. NBER Technical*.
- Irawan. 2011. *Central Government's Roles in New Autonomous Region Development in Bandung Barat. International Journal of Administrative Science & Organization*, 18(2), pp: 122-131.
- Keefer, Philip & Stuti Khemani. 2003. The Political Economy of Public Expenditures. *Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People*. The Word Bank.

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2004.

Kumorotomo, Wahyudi. 2010. *Akuntabilitas anggaran publik: isu politik, prioritas belanja dan silpa dalam alokasi APBD di beberapa daerah*. Makalah dipaparkan pada Konferensi Administrasi Negara ke-3, Bandung.

Kusnandar & Dodik Siswantoro. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Universitas Indonesia. Jakarta.

Liliana, Bunescu, Mihaiu Diana dan Comaniciu Carmen. 2011. Is There a Correlation between Government Expenditures, Population, Money Supply, and Government Revenues?. *International Journal of Arts & Sciences*, pp: 241-254.

Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. Economic Development and Cultural Change. Chicago Vol 49*. Hal : 1 – 21.

Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI Vol. 8, No. 2*.

Republik Indonesia, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Sekaran, Uma. 1992. *Research Methods for Business ( ASkill Building Approach)*. Second Edition, John Wiley & Sons, New York.
- Stine, William F. 1994. Is Local Government Revenue Response to Federal Aid Symetrical? Evidencefrom Pennsylvania Country Government in an Era of Retrenchment. *National Tax Journal*, Vol. 47 No. 4.
- Sugiarthi, Ni Luh Supadmi. 2014. Pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.2 (2014):477-495.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Rise Akuntansi FEIS Universitas Bakrie*. Vol. 1, No. 2. Jakarta.
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 1(2), h:142-155.